

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS WEBSITE
SE-JAWA BALI**

SKRIPSI



**NAMA : M.Syahrul Arifin
NIM : 222016262**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

**ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS WEBSITE
SE-JAWA BALI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**NAMA : M Syahrul Arifin
NIM : 222016262**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Syahrul Arifin
NIM : 222016262
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2021



M Syahrul Arifin

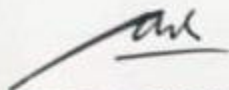
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali.
Nama : M Syahrul Arifin
NIM : 222016262
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2021

Pembimbing I,



Drs. Sunardi SE.,MSi
NIDN/NBM: 0206046303/784021

Pembimbing II,



Welly SE.,M.Si
NIDN/NBM: 0212128102/1085022

Mengetahui
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin SE., M.Si., Ak.CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali – Imran : 159)

“Segera laksanakan rencana keberhasilan mu di hari ini, jangan tunda lagi, jangan buang waktu, karena waktu tak bisa menunggu”

*Terucap syukur pada Allah SWT
kupersembahkan kepada:*

- Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya kepadaku*
- Kakak dan ayukku yang aku cintai*
- Keluarga Besar tercinta*
- Dosen Pembimbingku yang baik*
- Almamaterku tercinta yang aku banggakan*



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali, dengan baik dan tepat pada waktunya. Sebagaimana diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak selesai tanpa dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs.Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Welly S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E.,M.Si.,Ak,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si,CA selaku pembimbing akademik paket 17 akuntansi.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ayahku Nawawi dan Ibuku Cik Noni Yang telah sangat berjasa dalam mendidik dan tidak henti mendo'akanku setiap saat, memberikan nasihat dukungan moral maupun materil.
7. Saudaraku yang telah memberikanku semangat, hiburan dan dukungan selama penulisan skripsi.
8. Teman-temanku selama diperkuliahan yang telah memberikanku semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabatku Wahyu, Andi, Astra, Benny, Derry, Arya, Fikri, Heru yang telah memberikanku dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan, amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin

Wasaalamualaikum Wr.Wb

Palembang, April 2021

Penulis

M Syahrul Arifin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori.....	11
1. Transparansi.....	11
a. Pengertian Transparansi	11

b. Tujuan Transparansi.....	13
c. Instrumen Untuk Mewujudkan Transparansi	14
d. Indeks Keterbukaan Informasi Berdasarkan <i>Open Budget Survey</i> yang dikeluarkan <i>IBP</i>	14
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	16
a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	16
b. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	18
3. Good Governance	23
a. Pengertian Good Governance	23
b. Prinsip Dasar Good Governance.....	25
B. Penelitian Sebelumnya	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	34
D. Data yang Diperlukan	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	38
1. Analisis Data	38
2. Teknik Analisis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan65

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se-Jawa Bali8
Tabel II.1	Skor Transparansi15
Tabel II.2	Penelitian Sebelumnya32
Tabel III.1	Daftar Website Resmi Pemprov di Jawa-Bali34
Tabel III.2	Operasionalisasi Variabel35
Tabel III.3	Sub Indikator35
Tabel IV.1	Tahap Perencanaan dalam Indeks Transparansi57
Tabel IV.2	Tahap Pelaksanaan dalam Indeks Transparansi58
Tabel IV.3	Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dalam Indeks Transparansi60
Tabel IV.4	Indeks Transparansi61
Tabel IV.5	Skor Transparansi63
Tabel IV.6	Hasil Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1	Tampilan menu utama website Provinsi DKI Jakarta.....41
Gambar IV.2	Tampilan menu utama website Provinsi Jawa Barat.....43
Gambar IV.3	Tampilan menu utama website Provinsi Jawa Tengah45
Gambar IV.4	Tampilan menu utama website Provinsi Jawa Timur47
Gambar IV.5	Tampilan menu utama website Provinsi D.I Yogyakarta49
Gambar IV.6	Tampilan menu utama website Provinsi Banten.....50
Gambar IV.7	Tampilan menu utama website Provinsi Bali.....53
Gambar IV.8	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	69
Lampiran 2 Foto Copy Hafalan Surat-Surat Pendek Al-Qur'an.....	70
Lampiran 3 Foto Copy Sertifikat SPSS	71
Lampiran 4 Foto Copy Sertifikat Komputer Windows.....	72
Lampiran 5 Foto Copy Sertifikat Komputer Akuntansi.....	73
Lampiran 6 Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian.....	74
Lampiran 7 Biodata Penulis.....	75

ABSTRAK

M Syahrul Arifin/222016262/2021/Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa Bali?. Tujuannya untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah berbasis website se-Jawa Bali dengan satu variabel yaitu, pengelolaan keuangan daerah dikembangkan menjadi empat indikator. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali masih sangat sedikit yakni 28,37%.


Kata Kunci: transparansi pengelolaan keuangan

ABSTRACT

M Syahrul Arifin/222016262/2021/ Analysis of Transparency of Regional Government Financial Management based on Websites in Java and Bali

The formulation of the problem in this research identified how was the transparency of the financial management of the regional government based on websites in Java and Bali. The aim was to find out the transparency of regional government financial management based on websites in Java. This research was a descriptive study, which analyzed the transparency of regional government financial management based on websites in Java and Bali on one variable. The regional financial management is divided into four indicators. The data used was secondary. The technique of collecting the data used was documentation. The data analysis technique used was qualitative analysis. The results showed that the analysis of the transparency of regional government financial management based on websites in Java and Bali had the average in the level of small in 28.37%.

Keyword: financial management transparency

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A82	<i>M Syahrul Arifin</i>	<i>222016262</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera adalah amanat UUD 1945. Pemerintah harus menjalankan segala kegiatan pemerintahan dengan baik dan bersih agar dipercaya oleh masyarakat. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Karenanya untuk mewujudkan *good governance* pada tahun 2008, disahkanlah undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan *legal standing* bagi public untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi public, serta kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap.

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019: 17).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Prinsip dasar *good governance* (Abdul, 2019: 18) ialah, 1. *Public Participation* adalah Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. *Rule of Law* adalah Rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 3. *Transparency* adalah Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 4. *Resposiveness* adalah Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stake-holders*. 5. *Consensus Orientation* adalah *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. *Equity* adalah Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 7. *Effectiveness and Efficiency* adalah Proses dan lembaga menghasilkan *public goods* dan *services* sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 8.

Strategic vision adalah Para pimpinan organisasi publik harus mempunyai perpektif *good governance* dan pengembangan manusia yang jauh kedepan.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu (Abdul, 2019: 30).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayainya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 2019: 3).

Berdasarkan Undang-undang Pasal 283 Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Bab 1 Pasal 1 No 8 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasa keuangan daerah.

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel (Mahmudi, 2019: 16).

Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. Website merupakan miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. Website memberikan informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang membuatnya. Website bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemiliknya apapun yang dimimpikan bisa dituangkan dalam bentuk website (Taufik, 2014: 5).

Berikut ini dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam indikator dari setiap tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia (Irwan dkk, 2016: 125) sebagai berikut:

Tahap Perencanaan: Ringkasan Dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, Ringkasan Dokumen RKA-SKPD, Ringkasan Dokumen RKA-PPKD, Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD, Ringkasan DPA SKPD dan DPA SKPD.

Tahap Pelaksanaan: Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Realisasi Pembiayaan Daerah, Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Ringkasan RKA Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan, SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Tahap Pelaporan: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI.

Tahap Evaluasi Kinerja: Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD,

Laporan Realisasi Anggaran Seluruh PPKD, Neraca, CaLK Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Opini BPK RI.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi, dkk (2013) *Transparansi Keuangan dan Kinerja pada website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 491 Pemda tingkat dua, hanya 429 website yang berhasil diakses dan diamati sepanjang pertengahan mei sampai akhir juli 2013. Berdasarkan ceklis yang telah dibuat maka diperoleh tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja dalam website resmi Pemda hanya sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun implemementasi pengembangan *e-gevoornment* di Indonesia, terutama untuk transparansi informasi keuangan dan kinerja, Pemda masih berada pada tahap awal yaitu persiapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan, dkk (2016) *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: berbasis website*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat tranparansi pengelolaan daerah masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. Pemprov dengan peringkat tertinggi adalah Pemprov Jawa Tengah dengan indeks sebesar 50% dan yang terendah adalah Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Maluku Utara, dan Pemprov Papua Barat dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang masing-masing sebesar 3,45%.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmanto, dkk (2016) Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten bulukumba dari beberapa indikator memiliki nilai indeks kumulatif 2.02 dengan kategori kurang baik. Transparansi pengelolaan anggaran yang dilakukakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dari beberapa indikator memiliki nilai indeks kumulatif 2.81 dengan kategori baik. Trasnparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dari beberapa indikator memiliki nilai indeks kumulatif 1,98 dengan kaategori kurang baik. Trasnparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Marga Kabupaten Bulukumba dari beberapa indikator memiliki nilai indeks kumulatif 2.09 dengan kategori kurang baik.

Pulau se-Jawa Bali mempunyai 7 provinsi yang terdiri dari provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, provinsi D.I Yogyakarta, provinsi Banten dan provinsi Bali. Provinsi DKI Jakarta mempunyai 1 kabupaten dan 5 kota, provinsi Jawa Barat mempunyai 18 kabupaten dan 9 kota, provinsi Jawa Tengah mempunyai 29 kabupaten dan 6 kota, provinsi Jawa Timur mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota, provinsi D.I Yogyakarta mempunyai 4 kabupaten dan 1 kota, provinsi Banten mempunyai 4 kabupaten dan 4 kota, provinsi Bali mempunyai 8 kabupaten dan 1 kota.

Berikut ini Dokumen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang ada di website dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Jawa Bali

No	Provinsi	Ada	Tidak Ada
1.	DKI Jakarta	✓	
2.	Jawa Barat	✓	
3.	Jawa Tengah	✓	
4.	Jawa Timur		✓
5.	D.I Yogyakarta		✓
6.	Banten	✓	
7.	Bali		✓

Sumber: Website, 2020

Dari Tabel I.1 dapat diketahui bahwa ada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan provinsi tersebut telah melakukan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik dan begitu juga sebaliknya tidak ada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan provinsi tersebut tidak melakukan atau belum melakukan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik.

Transparansi keuangan pemerintah daerah se-Jawa Bali belum sepenuhnya transparan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya 4 Provinsi yang memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Sedangkan Provinsi Jawa Timur, D.I Yogyakarta, dan Bali belum memberikan informasi keuangan yang transparan kepada publik.

Adanya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah memperlihatkan dokumen DPA PPKD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, RKA Perubahan APBD, dan laporan keuangan ialah menunjukkan provinsi tersebut telah melakukan transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada publik. Jika tidak adanya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi ialah provinsi tersebut tidak transparansi atau belum transparansi dan tidak ada dokumen laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di informasikan kepada publik.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka adanya fenomena tersebut penulis mengambil judul “**Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang ada tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan informasi pendukung tentang transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Baldric Siregar, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Dwi Martani, Debby Fitriasari, dan Annisa, 2013. Transparansi Keuangan dan Kinerja pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil*. Vol.5. Hal 70-79. Diakses 24 April 2020.
- Ely Siswanto, 2013. *Good University Governance*, Prinsip dan Implementasi dalam Penggalan Pendapatan. Penerbit: Gunung Samudera.
- Firmanto Latief dan Dyah Mutiarin, 2014. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Jurnal Publik*. Vol.3, No.2. Hal 1-18. Diakses 24 April 2020. <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0058>.
- Hendra Karianga, 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Penerbit: Cimanggis, Kencana.
- Irwan taufiq Ritonga dan Syamsul, 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol.20, No.2. Hal 110-126. Diakses 24 April 2020. <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>.
- Jazim Hamidi, 2012. *Teori & Hukum Perencanaan Perda*. Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia. Penerbit: Universitas Brawijaya
- Luqman Hakim, 2013. *Problem Demokratisasi dan Good Governance di Era Reformasi*. Penerbit: Universitas Brawijaya.
- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Muhammad Rizki Alwahidi dan Darwanis, 2019. Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol.4, No.1. Hal 151-163. Diakses 18 Juli 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, 2006. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2005. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik, 2010. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2014. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah, 2019. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Technobiz.* Vol.3, No.5. Hal 25-30. Diakses 18 Juli 2020.

V. Wiratna Sujarweni, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.